



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG**



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
2023 - 2026**

Februari 2016

JALAN PELITA NO. 1 SINGKAWANG 79123

Laman: bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el: bpkad@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan ridho-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis perubahan yang telah disusun ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun ke depan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

Kota Singkawang



Widatoto. S, S.E., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 199710 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	43
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 72
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	72
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD	73
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	76
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 78
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	78
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 80
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	80

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	82
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII	PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pegawai Menurut Golongan/Ruang	43
Tabel 2.2 Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal	44
Tabel 2.3 Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselon	44
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana BPKAD Kota Singkawang	45
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Layanan BPKAD Kota Singkawang	48
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kota Singkawang	49
Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan	74
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan RTRW dan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	76
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kota Singkawang	79
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Kota Singkawang	81
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kota Singkawang ..	84
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD Kota Singkawang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Singkawang menjadi salah satu Kab/Kota di Indonesia yang pada Tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD. RPD yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan



informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi. Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD). Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
39. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
41. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
42. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembara Daerah Kota Singkawang



Tahun 2022 Nomor 5);

43. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
45. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingana (*stakeholders*) tentang rencana kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahunnya;
2. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang;
3. Terbentuknya penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang yang tersinkronisasi pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan continue;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Memberikan Pedoman Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan;
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan beserta seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Meningkatkan kinerja organisasi;



3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staff badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPKAD dengan OPD lainnya serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
5. Agar pencapaian Kinerja Setiap Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih terukur khususnya dalam Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 866 Tahun 2017 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang disusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang



**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
SINGKAWANG**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), merupakan landasan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan Tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan berdasarkan Keputusan Wali



Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/209/SETDA.OR-A Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Sub-Subtansi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas **“Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Keuangan”**.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang keuangan;
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang keuangan;
5. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi keuangan;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
8. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang keuangan.

2.1.2 Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Sub bagian 2 (dua) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - c. Perencana Ahli Muda



3. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Rencana Anggaran
 - b. Sub Bidang Analisa Anggaran
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban
5. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
7. Unit Pelaksanaan Teknis, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2.1 Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang keuangan;
2. Penetapan sasaran strategis bidang keuangan;
3. Penetapan program kerja di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan Pengkoordinasian kegiatan di bidang keuangan meliputi anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah;



6. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang keuangan;
7. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang keuangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
3. Pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
4. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian dan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;



- 6) Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan pelayanan publik dan budaya kerja;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- 9) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- 10) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, standar pelayanan, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- 11) Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 13) Menyusun konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian;



- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaporkan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.
- B. Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencan kegiatan bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
 - 7) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 8) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, reformasi birokrasi, SPIP, risk management, standar pelayanan minimal, proses bisnis;
 - 9) Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan; dan



- 11) Melaporkan kegiatan bidang perencanaan dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris.
- C. Kelompok Sub-substansi Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan dan aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - 5) Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD / laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengkoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - 7) Melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi daerah;
 - 8) Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan,



- koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- 9) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 - 10) Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
 - 11) Menyusun konsep naskah dinas bidang keuangan dan aset;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset yang telah dilaksanakan; dan
 - 13) Melaporkan kegiatan bidang keuangan dan aset kepada sekretaris.

2.1.2.3 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran daerah meliputi analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran.

Bidang Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang anggaran daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran;



4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa anggaran, rencana anggaran, serta pengendalian anggaran; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Subbidang Analisa Anggaran mempunyai uraian tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Analisa Anggaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang analisa anggaran;



- 5) Melaksanakan analisa dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, melaksanakan analisa dan mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- 6) Melaksanakan analisa dan koordinasi alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan melaksanakan analisa dan koordinasi alokasi anggaran dalam penyusunan KUPA/PPAS Perubahan;
- 7) Melaksanakan analisa dan koordinasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Kemampuan Daerah Tahun Anggaran Berjalan, melaksanakan analisa dan koordinasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD mendahului;
- 8) Melaksanakan analisa realisasi APBD sebagai rekomendasi anggaran tahun selanjutnya, melaksanakan analisa dan menyusun anggaran belanja daerah serta mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- 10) Menyusun konsep naskah dinas bidang analisa anggaran;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Analisa Anggaran yang telah dilaksanakan;
- 12) Melaporkan kegiatan Subbidang Analisa Anggaran kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.



B. Subbidang Rencana Anggaran mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Rencana Anggaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang rencana anggaran;
- 5) Melaksanakan penyusunan, pembahasan dan verifikasi RKA SKPD dan PPKD dalam rangka penyusunan APBD, melaksanakan penyusunan, pembahasan dan verifikasi perubahan RKA SKPD dan PPKD dalam rangka penyusunan perubahan APBD;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan penyiapan dokumen-dokumen pengantar dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang APBD, melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 8) Melaksanakan penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang APBD hasil pembahasan bersama DPRD, melaksanakan penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD hasil pembahasan bersama DPRD;



- 9) Melaksanakan penyempurnaan hasil evaluasi provinsi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang APBD, melaksanakan penyempurnaan hasil evaluasi provinsi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 10) Melaksanakan koordinasi dan penyiapan dokumen penetapan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang APBD dan Perubahan APBD;
 - 11) Melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD, melaksanakan koordinasi dan penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD;
 - 12) Menyusun konsep naskah dinas bidang rencana anggaran;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Rencana Anggaran yang telah dilaksanakan;
 - 14) Melaporkan kegiatan Subbidang Rencana Anggaran kepada Kepala Bidang Anggaran Daerah; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- C. Kelompok Sub-substansi Pengendalian Anggaran mempunyai uraian tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang Pengendalian Anggaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian anggaran;
- 5) Melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA SKPD-PPKD pada APBD, melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPPA SKPD-PPKD pada perubahan APBD;
- 6) Melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan anggaran kas pada DPA SKPD-PPKD pada APBD, melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan anggaran kas pada DPPA SKPD-PPKD pada perubahan APBD;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan anggaran belanja SKPD-PPKD, melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran pemerintah daerah;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah, melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- 10) Melaksanakan implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah dan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah;
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- 12) Melaksanakan koordinasi penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan



APBD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;

- 13) Menyusun rencana pelaksanaan anggaran meliputi penerbitan surat keputusan tentang petunjuk pejabat pengelola keuangan, pengguna anggaran, kuasa BUD serta Bendahara di lingkungan SKPD maupun SKPKD;
- 14) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian anggaran;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian anggaran yang telah dilaksanakan; dan
- 16) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian anggaran kepada kepala bidang anggaran daerah.

2.1.2.4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah meliputi akuntansi, sertapengendalian dan pelaporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi, serta pengendalian dan pelaporan keuangan daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mengoordinasikan subbidang yang terdiri dari:

- A. Subbidang Akuntansi mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Akuntansi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang akuntansi;
 - 5) Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah, menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;



- 6) Melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perangkat daerah, melakukan pemantauan atas pencatatan dan penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh perangkat daerah, melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh perangkat daerah, melakukan pemantauan atas postingan penerimaan yang dilakukan oleh perangkat daerah;
- 7) Melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah, mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah, menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas, melakukan pencatatan dan penggolongan atas transaksi pengeluaran, pengikhtisaran pengeluaran, melakukan posting atas pengeluaran, melakukan verifikasi data utang piutang, persediaan dan pos-pos lain yang mendukung penyusunan neraca;
- 8) Melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan perangkat daerah non BLUD, BLUD dan PPKD (rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan-LO dan Beban), melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan (realisasi penerimaan dan pengeluaran) SKPD, BLUD, dan PPKD, melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan/pengujian atas realisasi penerimaan (bukti memorial), melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- 9) Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 10) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah, melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
 - 11) Menyusun konsep naskah bidang akuntansi sesuai;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi yang telah dilaksanakan;
 - 13) Melaporkan kegiatan Subbidang Akuntansi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- B. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
 - 5) Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah), menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan), menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, menyusun laporan realisasi anggaran, laporan



- perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- 6) Menyusun ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dan laporan keuangan BUMD, menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 7) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 8) Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
 - 9) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- 10) Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 11) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian dan pelaporan keuangan daerah;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbidang pengendalian dan pelaporan keuangan daerah yang telah dilaksanakan;
- 13) Melaporkan kegiatan subbidang pengendalian dan pelaporan keuangan daerah kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.5 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan daerah meliputi pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang perbendaharaan daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan;
4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kas daerah, serta pengendalian perbendaharaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah mengoordinasikan Subbidang yang terdiri dari:

- A. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan kas daerah;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan kas daerah, mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah, melaksanakan pemindahbukuan kas daerah, mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah, memantau



pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- 6) Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas, melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan, melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- 7) Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah, melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- 8) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah, merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- 9) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah, menyimpan uang daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pembeian penjaminan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;



- 10) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah, melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
 - 11) Melaksanakan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah meliputi: analisis investasi pemerintah daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pinjaman pemerintah daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah, analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah, penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi, analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah, pengelolaan dana darurat dan mendesak, pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;
 - 12) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan kas daerah;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah yang telah dilaksanakan;
 - 14) Melaporkan kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- B. Subbidang Pengendalian Perbendaharaan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian Perbendaharaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;



- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian perbendaharaan;
- 5) Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan), mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
- 6) Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM, melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah, meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- 7) Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan pihak ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- 8) Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- 9) Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan, melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah;
- 10) Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- 11) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah, merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- 12) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian perbendaharaan;



- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Perbendaharaan yang telah dilaksanakan;
- 14) Melaporkan kegiatan Subbidang Pengendalian Perbendaharaan pengendalian perbendaharaan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.6 Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, serta pemanfaatan dan penatausahaan.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan progrm kerja bidang pengelolaan aset daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan;
4. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan



- dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penggunaan, pengamanan dan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan;
 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penatausahaan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mengoordinasikan Subbidang dan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Subbidang Perencanaan dan Penggunaan mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penggunaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penggunaan;
 - 5) Menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana pemeliharaan/perawatan barang milik daerah dari pengguna barang untuk ditetapkan, meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;



- 6) Menyusun standar harga, standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah, memfasilitasi penyusunan saran dan prasarana kerja pemerintah daerah;
 - 7) Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala, melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
 - 8) Meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah, menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah, menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 9) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan aset, memfasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pendayagunaan aset;
 - 10) Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian barang daerah, melaksanakan penyimpanan dan pengadministrasian/pembukuan terhadap barang daerah dan melakukan analisis kelengkapan dokumen pengadaan barang daerah;
 - 11) Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penggunaan yang telah dilaksanakan;
 - 13) Melaporkan kegiatan Subbidang Kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- B. Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;



- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengamanan dan pemindahtanganan;
- 5) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- 6) Melaksanakan proses pengamanan barang, menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah, melakukan penyimpanan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah, menyimpan dan mengamankan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- 7) Melaksanakan proses pemindahtanganan barang, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah, meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah dan menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 8) Melaksanakan proses pemusnahan dan penghapusan barang, melaksanakan penyusunan dokumen, prosedur dan penghapusan aset daerah meliputi: meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah dan menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan



barang milik daerah, meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah dan menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;

- 9) Melaksanakan penilaian barang milik daerah dalam rangka pencatatan barang milik daerah, menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - 10) Menghimpun laporan hasil pengadaan barang milik daerah dari pengguna barang untuk ditetapkan status penggunaannya;
 - 11) Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, penjualan, hibah terhadap barang daerah;
 - 12) Menyusun konsep naskah dinas bidang pengamanan dan pemindahtanganan;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan yang telah dilaksanakan;
 - 14) Melaporkan kegiatan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- C. Kelompok Sub Substansi Pemanfaatan dan Penatausahaan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang Pemanfaatan dan Penatausahaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;



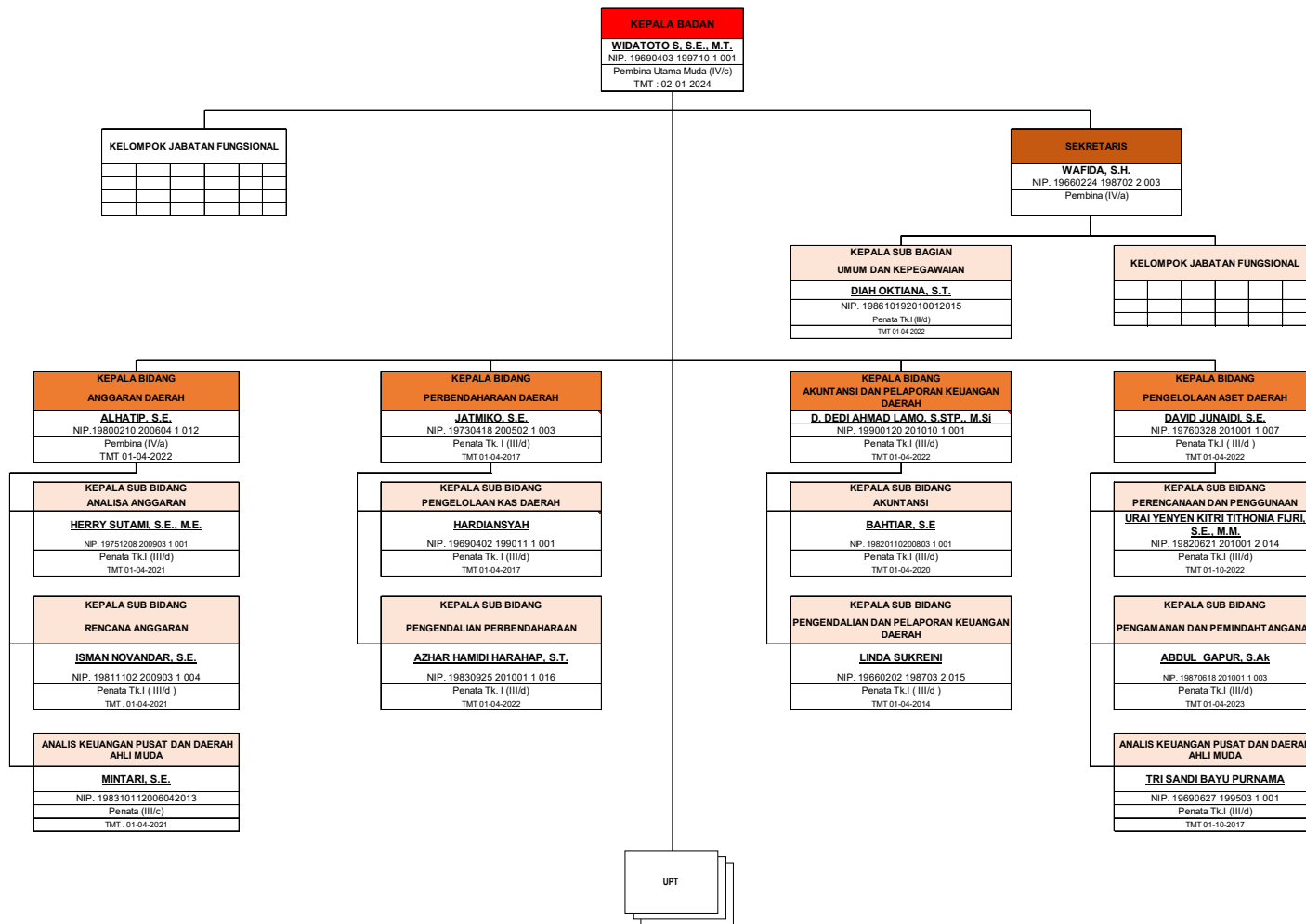
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
- 3) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan penatausahaan;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pemberian rekomendasi terhadap hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
- 6) Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- 7) Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, mengumpulkan data inventaris barang, melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dan sensus barang daerah, menyusun data dasar neraca aset daerah;
- 8) Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah dan menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- 9) Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- 10) Menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 11) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah terdiri dari penatausahaan dan pelaporan;
- 12) Menghimpun dan merekapitulasi pencatatan dan penambahan pengurangan barang milik daerah seluruh perangkat daerah, menghitung nilai akumulasi penyusutan barang milik daerah;



- 13) Menghimpun usulan pejabat fungsional umum yang mengurus barang milik daerah dari pengguna barang untuk ditetapkan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- 14) Melakukan koordinasi dengan bidang akuntansi terkait penyusunan neraca aset pada LKPD, melaksanakan penilaian aset daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP);
- 15) Menyusun konsep naskah dinas bidang pemanfaatan dan penatausahaan;
- 16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemanfaatan dan Penatausahaan yang telah dilaksanakan; dan
- 17) Melaporkan kegiatan bidang Pemanfaatan dan Penatausahaan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang





2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai, adapun sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan berjumlah 36 orang dengan rincian :

Tabel 2.1
Pegawai Menurut Golongan/Ruang
(Data Per 17 Januari 2024)

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2.	Pembina Tk.I(IV/b)	-
3.	Pembina (IV/a)	2 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	13 Orang
5.	Penata (III/c)	2 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	4 Orang
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
9.	Pengatur (II/c)	3 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Jumlah	



Tabel 2.2
Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal
(Data Per 17 Januari 2024)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S– 2 (Pasca Sarjana)	3 Orang
2.	S– 1 (Sarjana)	18 Orang
3.	D– 3 (Diploma Tiga)	9 Orang
4.	D– 1 (Diploma Satu)	-
5.	SLTA	6 Orang
6.	SLTP	-
	Jumlah	36 Orang

Tabel 2.3
Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselon
(Data Per 17 Januari 2024)

No	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1 Orang
2.	Sekretaris (Eselon III)	1 Orang
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	1 Orang
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	8 Orang
	Jumlah	15 Orang



2. Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Data Per 1 Januari 2024)

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	11	-	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	32	-	
3.	Printer	47	-	
4.	Lap Top	16	-	
5.	Mesin Ketik	-	-	
6.	Personal Computer (PC)	37	-	
7.	Mesin Ketik Elektrik	-	-	
8.	Meja Rapat	-	-	
9.	Meja ½ Biro	23	-	
10.	Meja Kursi Tamu	4	-	
11.	Meja Eselon II	2	-	
12.	Meja Eselon III	7	-	
13.	Meja Eselon IV	7	-	
14.	Kursi Eselon II	5	-	
15.	Kursi Eselon III	1	-	
16.	Kursi Eselon IV	7	-	
17.	Lemari Besi	21	-	



No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
18.	Rak Besi	5	-	
19.	Filling Kabinet	20	-	
20.	Kipas Angin	2	-	
21.	AC	19	-	
22.	Brankas	3	-	
23.	LCD Proyektor+Attachment	5	-	
24.	HandyCam	1	-	
25.	Penjernih Udara (Air Purifier)	6	-	
26.	Handy Talkie (HT)	2	-	
27.	Hardisk Eksternal	5	-	
28.	Werelles	1	-	
29.	UPS Stabilizer	4	-	
30.	Pesawat Telepon	7	-	
31.	Televisi	4	-	
32.	Lemari Kaca	5	-	
33.	Camera+Digital	3	-	
34.	Dispenser	3	-	
35.	Penghancur Kertas	4	-	
36.	Scanner	5	-	
37.	Pompa Air	1	-	
38.	GPS	4	-	
39.	Note Book	8	-	



No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
40.	Tablet	2	-	
41.	Sofa	1	-	
42.	Tangki Air	1	-	
43.	Vacum Cleaner	1	-	
44.	Hand Dryer	1	-	
45.	Sepeda	1	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/ barang daerah. Adapun capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase OPD yang Menyusun RKA dan DPA secara tepat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase ketepatan penerbitan SPD untuk OPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase penggunaan SAB Dalam penyusunan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang SP2D Nya diterbitkan tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase laporan keuangan OPD dan SKPKD yang disusun tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase OPD yang menyampaikan laporan barang daerah tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	4.500.000	7.411.500	2.920.000	4.700.000	2.011.500	2.241.000	3.357.000	2.287.000	1.100.000	67,05	49,80	45,29	78,32	23,40	4.506.300	2.199.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	507.420.950	547.420.950	292.967.563	-	345.400.426	340.642.582	300.626.244	268.773.762	-	386.704.739	67,13	54,92	91,74	0,00	111,96	338.641.978	259.349.465
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	210.000.000	14.500.000	15.000.000	-	-	177.649.400	8.007.800	14.133.900	-	-	84,59	55,23	94,23	0,00	0,00	47.900.000	39.958.220
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	250.000.000	235.500.000	513.385.000	-	-	245.275.000	235.450.000	494.210.000	-	-	98,11	99,98	96,26	0,00	0,00	199.777.000	194.987.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.104.250	1.200.000	21.065.750	-	-	15.630.250	1.200.000	21.065.750	-	-	97,06	100,00	100,00	0,00	0,00	7.674.000	7.579.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.149.050	109.149.050	99.947.350	-	-	104.069.325	104.223.350	123.073.050	-	-	95,35	95,49	123,14	0,00	0,00	63.649.090	66.273.145
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.325.875	52.702.825	37.204.925	46.773.404	17.821.600	16.245.900	14.133.300	27.672.425	42.026.843	31.623.626	59,45	26,82	74,38	89,85	177,45	36.365.726	26.340.419
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	13.401.676	9.998.500	-	-	-	13.381.600	9.702.000	0,00	0,00	0,00	99,85	97,03	4.680.035	4.616.720
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.892.400	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	1.000.000	978.480
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	-	-	-	10.408.814	5.000.000	-	-	-	10.396.398	4.961.150	0,00	0,00	0,00	99,88	99,22	3.081.763	3.071.510



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	-	-	-	-	7.076.900	-	-	-	-	6.996.900	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	1.415.380	1.399.380
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	-	-	-	16.987.203	6.819.700	-	-	-	16.984.300	6.694.600	0,00	0,00	0,00	99,98	98,17	4.761.381	4.735.780
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	-	-	-	5.512.376	5.321.100	-	-	-	4.957.120	5.303.650	0,00	0,00	0,00	89,93	99,67	2.166.695	2.052.154
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	-	-	-	8.729.896.540	8.059.696.831	-	-	-	7.902.176.803	8.810.719.689	0,00	0,00	0,00	90,52	109,32	3.357.918.674	3.342.579.298
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	-	-	-	1.193.391.640	1.072.553.600	-	-	-	1.184.838.480	1.143.595.573	0,00	0,00	0,00	99,28	106,62	453.189.048	465.686.811
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	-	-	-	5.950.508	4.956.800	-	-	-	5.888.340	4.701.800	0,00	0,00	0,00	98,96	94,86	2.181.462	2.118.028
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	58.855.950	-	-	-	-	58.855.950	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11.771.190	11.771.190
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	290.250.000	419.975.000	16.800.000	16.756.032	13.324.800	160.233.610	309.226.110	16.799.700	16.755.000	15.446.574	55,21	73,63	100,00	99,99	115,92	151.421.166	103.692.199



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	9.104.250	-	359.053.323	41.272.700	-	8.415.700	-	348.458.128	88.433.037	0,00	92,44	0,00	97,05	214,27	81.886.055	89.061.373
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.450.000	7.170.000	5.724.150	25.880.000	7.018.800	4.200.000	6.040.000	5.160.000	25.160.000	4.730.000	65,12	84,24	90,14	97,22	67,39	10.448.590	9.058.000
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	143.093.170	32.279.100	-	-	-	142.763.340	36.546.740	0,00	0,00	0,00	99,77	113,22	35.074.454	35.862.016
Penyediaan Makanan Dan Minuman	40.800.000	62.900.000	59.700.000	-	-	34.582.716	14.497.425	59.497.000	-	-	84,76	23,05	99,66	0,00	0,00	32.680.000	21.715.428
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.186.153.116	1.350.000.000	785.546.600	-	-	981.267.569	1.349.977.075	743.407.280	-	-	82,73	100,00	94,64	0,00	0,00	664.339.943	614.930.385
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	350.710.070	364.411.400	423.528.196	-	-	342.919.440	362.647.030	400.880.600	-	-	97,78	99,52	94,65	0,00	0,00	227.729.933	221.289.414
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	-	-	-	512.095.000	333.988.499	-	-	-	512.095.000	787.026.265	0,00	0,00	0,00	100,00	235,64	169.216.700	259.824.253
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	-	-	178.489.600	-	-	-	-	159.100.000	-	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	35.697.920	31.820.000
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	-	-	247.450.500	652.952.050	-	-	-	242.649.500	138.245.800	0,00	0,00	0,00	98,06	21,17	180.080.510	76.179.060



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	88.583.190	-	-	-	-	83.951.015	-	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	17.716.638	16.790.203
Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah	45.000.000	30.000.000	-	-	-	16.105.000	-	-	-	-	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000	3.221.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	719.000.000	3.429.493.000	663.000.000	-	-	612.800.000	3.369.500.000	547.800.000	-	-	85,23	98,25	82,62	0,00	0,00	962.298.600	908.020.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	924.750.000	871.042.850	1.653.424.400	-	-	778.478.074	837.795.000	1.536.652.000	-	-	84,18	96,18	92,94	0,00	0,00	689.843.450	630.585.015
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	796.810.000	547.200.000	986.547.000	-	-	735.950.000	525.980.000	14.627.127.841	-	-	92,36	96,12	1482,66	0,00	0,00	466.111.400	3.177.811.568
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	-	-	-	-	24.716.700	-	-	-	-	24.463.921	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	4.943.340	4.892.784
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.149.000	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	1.000.000	829.800
Pengelolaan Dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	3.647.300	-	-	-	-	3.207.900	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	729.460	641.580
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	-	-	-	-	5.000.100	-	-	-	-	4.607.700	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	1.000.020	921.540



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	-	-	-	-	4.999.800	-	-	-	-	4.665.750	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	999.960	933.150
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	498.864.000	-	-	-	-	729.900.500	0,00	0,00	0,00	0,00	146,31	99.772.800	145.980.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	21.940.000	-	-	-	-	21.572.482	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	4.388.000	4.314.496
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	34.112.000	-	-	-	-	29.749.000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	6.822.400	5.949.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	111.392.746	85.328.600	-	-	-	106.836.300	83.371.300	0,00	0,00	0,00	95,91	97,71	39.344.269	38.041.520
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	-	-	103.761.350	90.710.000	-	-	-	101.283.498	99.773.097	0,00	0,00	0,00	97,61	109,99	38.894.270	40.211.319
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	-	-	85.880.800	57.620.000	-	-	-	85.859.000	73.123.000	0,00	0,00	0,00	99,97	126,91	28.700.160	31.796.400



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1.050.335.000	-	-	-	-	1.037.042.125	-	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	210.067.000	207.408.425
Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	-	-	-	44.369.125	12.514.500	-	-	-	39.586.900	41.867.000	0,00	0,00	0,00	89,22	334,55	11.376.725	16.290.780
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas	-	-	-	47.121.100	19.937.000	-	-	-	43.408.900	13.999.000	0,00	0,00	0,00	92,12	70,22	13.411.620	11.481.580
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Rka-Skpd	-	-	-	30.611.200	17.480.600	-	-	-	29.149.300	30.658.000	0,00	0,00	0,00	95,22	175,38	9.618.360	11.961.460
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000.300	-	-	-	-	19.838.300	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	4.000.060	3.967.660
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Rka-Skpd	-	-	-	45.584.500	21.589.200	-	-	-	39.087.000	37.269.200	0,00	0,00	0,00	85,75	172,63	13.434.740	15.271.240
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Dpa-Skpd	-	-	-	5.439.310	7.776.400	-	-	-	4.733.500	22.653.000	0,00	0,00	0,00	87,02	291,30	2.643.142	5.477.300
Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Dpa-Skpd	-	-	-	80.287.428	5.721.500	-	-	-	44.814.800	24.320.000	0,00	0,00	0,00	55,82	425,06	17.201.786	13.826.960



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	-	-	-	170.503.925	82.972.000	-	-	-	145.959.000	206.624.486	0,00	0,00	0,00	85,60	249,03	50.695.185	70.516.697
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	-	-	-	253.314.165	82.411.500	-	-	-	167.907.700	201.748.739	0,00	0,00	0,00	66,28	244,81	67.145.133	73.931.288
Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	39.877.130	178.030.000	-	-	-	14.545.400	168.660.000	0,00	0,00	0,00	36,48	94,74	43.581.426	36.641.080
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	-	17.310.100	4.011.300	-	-	-	14.936.000	3.662.849	0,00	0,00	0,00	86,28	91,31	4.264.280	3.719.770
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	-	13.587.300	4.924.000	-	-	-	12.375.900	4.575.160	0,00	0,00	0,00	91,08	92,92	3.702.260	3.390.212
Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	100.270.800	7.315.300	-	-	-	100.129.800	10.841.000	0,00	0,00	0,00	99,86	148,20	21.517.220	22.194.160
Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	-	-	-	21.306.000	5.751.800	-	-	-	21.168.000	5.751.800	0,00	0,00	0,00	99,35	100,00	5.411.560	5.383.960



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	-	-	-	248.087.870	100.339.000	-	-	-	247.991.500	312.113.000	0,00	0,00	0,00	99,96	311,06	69.685.374	112.020.900
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	-	-	-	4.906.400	10.222.600	-	-	-	4.906.400	13.622.600	0,00	0,00	0,00	100,00	133,26	3.025.800	3.705.800
Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2D Dengan Instansi Terkait	-	-	-	23.429.400	24.087.400	-	-	-	22.781.400	48.681.400	0,00	0,00	0,00	97,23	202,10	9.503.360	14.292.560



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-	4.073.300	-	-	-	-	3.254.900	-	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	814.660	650.980
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	-	-	-	8.884.810	-	-	-	-	8.884.810	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.776.962	1.776.962
Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	213.864.861	113.557.700	-	-	-	213.610.981	200.401.150	0,00	0,00	0,00	99,88	176,48	65.484.512	82.802.426



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	95.178.808	25.363.900	-	-	-	94.420.808	31.539.300	0,00	0,00	0,00	99,20	124,35	24.108.542	25.192.022
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	4.115.866	-	-	-	-	4.115.866	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	823.173	823.173
Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	10.417.616	-	-	-	-	10.417.616	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.083.523	2.083.523
Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	2.370.000.000	1.239.933.340	-	-	-	2.314.459.497	359.725.007	0,00	0,00	0,00	97,66	29,01	721.986.668	534.836.901



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	-	-	-	10.400.000.000	9.850.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000.000	-
Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	365.114.610	262.635.000	-	-	-	347.533.301	186.119.250	0,00	0,00	0,00	95,18	70,87	125.549.922	106.730.510
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	33.115.431	48.288.400	-	-	-	25.757.192	55.677.255	0,00	0,00	0,00	77,78	115,30	16.280.766	16.286.889
Pengadaan Tanah	557.627.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.525.400	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	470.700.000	25.000.000	314.800.000	-	-	461.122.424	24.600.000	313.512.500	-	-	97,97	98,40	99,59	0,00	0,00	162.100.000	159.846.985
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	243.500.000	119.000.000	58.346.000	-	-	152.784.256	50.494.389	57.540.073	-	-	62,75	42,43	98,62	0,00	0,00	84.169.200	52.163.744
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95.000.000	95.000.000	103.404.750	-	-	60.863.500	37.510.000	95.180.500	-	-	64,07	39,48	92,05	0,00	0,00	58.680.950	38.710.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55.000.000	-	45.680.000	-	-	36.650.000	-	45.680.000	-	-	66,64	0,00	100,00	0,00	0,00	20.136.000	16.466.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	96.500.000	-	55.980.550	-	-	63.015.000	-	55.576.000	-	-	65,30	0,00	99,28	0,00	0,00	30.496.110	23.718.200



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000	42.000.000	11.678.667	-	-												
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	50.000.000	-	11.678.667	-	-	13719550	0	11678667	0	0	27,44	0,00	100,00	0,00	0,00	12.335.733	5.079.643
Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100.000.000	42.000.000	-	-	-	22708218	41531134	0	0	0	22,71	98,88	0,00	0,00	0,00	28.400.000	12.847.870
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	8.000.000	-	-	-	-	5996650	0	0	0	0	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000	1.199.330
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.991.450	7.945.250	6.693.300	-	-	6017725	7260750	6550400	0	0	75,30	91,38	97,87	0,00	0,00	4.526.000	3.965.775
Penyusunan Lakip Skpd	8.000.000	8.000.000	12.057.000	-	-	7100000	4343600	11861900	0	0	88,75	54,30	98,38	0,00	0,00	5.611.400	4.661.100
Penyusunan Renstra Skpd	8.600.000	-	13.998.300	-	-	3981750	0	12935800	0	0	46,30	0,00	92,41	0,00	0,00	4.519.660	3.383.510
Penyusunan Lppd / Lkpd	8.000.000	8.200.000	-	-	-	8000000	3139400	0	0	0	100,00	38,29	0,00	0,00	0,00	3.240.000	2.227.880
Penyusunan Profil Skpd	8.000.000	8.200.000	4.934.750	-	-	8000000	4677500	4673500	0	0	100,00	57,04	94,71	0,00	0,00	4.226.950	3.470.200
Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perjankin)	8.000.000	8.964.500	5.111.800	-	-	8000000	4921500	3980600	0	0	100,00	54,90	77,87	0,00	0,00	4.415.260	3.380.420
Penyusunan Renja Skpd	-	12.150.000	16.410.000	-	-	0	7128600	15047500	0	0	0,00	58,67	91,70	0,00	0,00	5.712.000	4.435.220
Expo Kinerja Skpd	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Peringatan Hari Besar Nasional Dan Daerah	-	54.500.000	-	-	-	0	10950000	0	0	0	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	10.900.000	2.190.000



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	160.488.000	132.388.000	140.698.000	-	-	138994000	81802500	133902400	0	0	86,61	61,79	95,17	0,00	0,00	86.714.800	70.939.780
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	67.483.200	80.970.200	69.682.700	-	-	58230500	24258000	53863000	0	0	86,29	29,96	77,30	0,00	0,00	43.627.220	27.270.300
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	87.000.000	112.959.500	141.059.500	-	-	80011200	24766500	97260700	0	0	91,97	21,93	68,95	0,00	0,00	68.203.800	40.407.680
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	50.111.000	50.764.500	77.244.500	-	-	44733800	27652000	69253200	0	0	89,27	54,47	89,65	0,00	0,00	35.624.000	28.327.800
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	71.958.325	94.383.750	69.036.250	-	-	68850500	71968750	69036250	0	0	95,68	76,25	100,00	0,00	0,00	47.075.665	41.971.100
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	34.201.000	37.911.900	40.002.700	-	-	33850450	37911900	40002700	0	0	98,98	100,00	100,00	0,00	0,00	22.423.120	22.353.010
Pengamanan Barang Milik Daerah	507.683.000	515.212.000	461.061.200	427.244.330	55.115.000	216536780	369672244	355358266	408423150	130580720	42,65	71,75	77,07	95,59	236,92	393.263.106	296.114.232



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	228.506.300	287.528.600	-	-	-	136313950	190232600	0	0	0	59,65	66,16	0,00	0,00	0,00	103.206.980	65.309.310
Rakor Dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	44.199.900	48.770.500	31.126.800	-	-	38126300	36529000	26903600	0	0	86,26	74,90	86,43	0,00	0,00	24.819.440	20.311.780
Fasilitasi Dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	563.078.351	594.036.000	384.734.000	-	-	514626474	484524567	344726210	0	0	91,40	81,56	89,60	0,00	0,00	308.369.670	268.775.450
Inventarisasi Barang Milik Daerah	16.196.350	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.270	-
Serah Terima Aset	27.681.200	-	-	-	-	9604350	0	0	0	0	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.240	1.920.870
Fgd Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd-Skpd Berbasis Akrua Menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	125.303.475	144.903.475	125.435.000	-	-	106478750	109970200	0	0	0	84,98	75,89	0,00	0,00	0,00	79.128.390	43.289.790
Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya	26.773.250	37.177.750	33.192.850	-	-	20050450	30221450	33127700	0	0	74,89	81,29	99,80	0,00	0,00	19.428.770	16.679.920
Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang	49.618.400	38.998.000	157.187.400	-	-	49558400	38991750	157187400	0	0	99,88	99,98	100,00	0,00	0,00	49.160.760	49.147.510



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Verifikasi Dpa-Skpd Dan Dppa-Skpd	26.466.000	39.266.000	33.205.950	-	-	11400800	19701000	24700800	0	0	43,08	50,17	74,39	0,00	0,00	19.787.590	11.160.520
Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana	19.834.000	19.834.000	15.233.800	-	-	12027400	6192650	9116800	0	0	60,64	31,22	59,85	0,00	0,00	10.980.360	5.467.370
Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/ Pihak Ketiga	10.964.350	12.620.900	39.008.250	-	-	10953550	12554425	37919650	0	0	99,90	99,47	97,21	0,00	0,00	12.518.700	12.285.525
Penyusunan Dokumen Penganggaran Skpd	7.999.800	7.934.600	8.126.400	-	-	7269150	7930200	8120275	0	0	90,87	99,94	99,92	0,00	0,00	4.812.160	4.663.925
Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (Spm)	19.577.300	26.072.000	16.763.622	-	-	19505925	25055000	16740372	0	0	99,64	96,10	99,86	0,00	0,00	12.482.584	12.260.259
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	70.450.600	21.091.100	0	0	0	55460639	33114800	0,00	0,00	0,00	78,72	157,01	18.308.340	17.715.088
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	45.499.420	11.171.000	0	0	0	38097364	15661500	0,00	0,00	0,00	83,73	140,20	11.334.084	10.751.773
Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	-	-	-	33.036.010	-	0	0	0	27929650	0	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	6.607.202	5.585.930



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	186.369.955	15.700.000	0	0	0	176060405	54608200	0,00	0,00	0,00	94,47	347,82	40.413.991	46.133.721
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	158.179.450	-	0	0	0	153420850	0	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	31.635.890	30.684.170
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	129.354.970	89.926.400	0	0	0	114071140	89651600	0,00	0,00	0,00	88,18	99,69	43.856.274	40.744.548
Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	217.768.510	178.715.750	0	0	0	174364301	147021134	0,00	0,00	0,00	80,07	82,27	79.296.852	64.277.087
Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt)	-	-	-	96.633.250	86.430.400	0	0	0	88565350	94375988	0,00	0,00	0,00	91,65	109,19	36.612.730	36.588.268
Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	263.719.780	203.530.300	0	0	0	238080370	215898915	0,00	0,00	0,00	90,28	106,08	93.450.016	90.795.857
Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	184.664.590	127.882.700	0	0	0	132228770	94502459	0,00	0,00	0,00	71,60	73,90	62.509.458	45.346.246
Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-	-	196.317.140	301.061.800	0	0	0	192639870	317906550	0,00	0,00	0,00	98,13	105,60	99.475.788	102.109.284



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	314.123.870	314.208.700	0	0	0	303844370	26655878	0,00	0,00	0,00	96,73	8,48	125.666.514	66.100.050
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	64.649.380	33.000.000	0	0	0	64457370	63007550	0,00	0,00	0,00	99,70	190,93	19.529.876	25.492.984
Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	118.037.260	180.500.200	0	0	0	117595880	115806923	0,00	0,00	0,00	99,63	64,16	59.707.492	46.680.561
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	19.093.940	-	0	0	0	15433940	0	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	3.818.788	3.086.788
Distribusi Barang Milik Daerah	16.885.500	21.173.250	16.074.100	-	-	12108210	20759550	15711200	0	0	71,71	98,05	97,74	0,00	0,00	10.826.570	9.715.792
Penilaian Barang Milik Daerah	-	29.272.300	33.624.100	222.512.748	7.683.700	0	3472700	32314350	215738720	19509200	0,00	11,86	96,10	96,96	253,90	58.618.570	54.206.994
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.160.000	20.180.000	24.279.075	-	-	4370050	16821300	24041250	0	0	33,21	83,36	99,02	0,00	0,00	11.523.815	9.046.520
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman Dan Penyusunan Apbd	-	85.000.000	-	-	-	0	55630000	0	0	0	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	17.000.000	11.126.000
Implementasi Paket Regulasi Tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang	-	5.235.800	875.000	-	-	0	4435800	875000	0	0	0,00	84,72	100,00	0,00	0,00	1.222.160	1.062.160
Fgd Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	6.713.400	-	-	0	0	4204400	0	0	0,00	0,00	62,63	0,00	0,00	1.342.680	840.880



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Penyusunan Dan Revisi Produk Hukum Pad	-	-	6.540.000	-	-	0	0	1366100	0	0	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	1.308.000	273.220
Gebyar Pajak Daerah	-	-	119.146.000	-	-	0	0	102426000	0	0	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	23.829.200	20.485.200
Penyelesaian Keberatan Dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non Pbb-Bphtb	-	-	34.842.000	-	-	0	0	19964800	0	0	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	6.968.400	3.992.960
Penerapan Sstlm Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online	-	-	117.587.300	-	-	0	0	111519850	0	0	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	23.517.460	22.303.970
Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	-	-	10.666.950	-	-	0	0	10346950	0	0	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	2.133.390	2.069.390
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pbb	241.722.350	215.697.400	121.574.900	-	-	185010063	149596509	119903850	0	0	76,54	69,35	98,63	0,00	0,00	115.798.930	90.902.084
Penertiban Izin Pemasangan Reklame	90.260.200	64.960.200	55.667.100	-	-	65309150	22460400	52641100	0	0	72,36	34,58	94,56	0,00	0,00	42.177.500	28.082.130
Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah	15.566.700	40.187.000	-	-	-	14448450	21906500	0	0	0	92,82	54,51	0,00	0,00	0,00	11.150.740	7.270.990
Pekan Panutan Pajak Bumi Dan Bangunan	175.843.000	178.264.000	94.325.000	-	-	149806200	152661750	94238000	0	0	85,19	85,64	99,91	0,00	0,00	89.686.400	79.341.190
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	133.718.625	148.791.450	98.559.200	-	-	122526516	141176591	94825000	0	0	91,63	94,88	96,21	0,00	0,00	76.213.855	71.705.621



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Singkawang

Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Intensifikasi Sumber Sumber Penerimaan Dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Air Tanah	537.375.600	404.787.200	123.002.500	-	-	381963200	202660176	119938900	0	0	71,08	50,07	97,51	0,00	0,00	213.033.060	140.912.455
Penertiban Penerimaan Pajak Daerah	188.546.200	120.922.200	58.099.600	-	-	83030400	80956200	49718800	0	0	44,04	66,95	85,58	0,00	0,00	73.513.600	42.741.080
Penyusunan Rancangan Perwako Pbb-P2	12.845.325	8.552.750	-	-	-	6721225	4444750	0	0	0	52,32	51,97	0,00	0,00	0,00	4.279.615	2.233.195
Pencetakan Massal Sppt Dan Dhkp Pbb- P2	111.024.050	159.540.100	415.427.100	-	-	105051350	157038900	410279700	0	0	94,62	98,43	98,76	0,00	0,00	137.198.250	134.473.990
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	150.167.000	187.417.000	-	-	-	4585000	87221500	0	0	0	3,05	46,54	0,00	0,00	0,00	67.516.800	18.361.300
Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah	705.335.500	339.195.500	218.455.500	-	-	692770975	291423884	190165200	0	0	98,22	85,92	87,05	0,00	0,00	252.597.300	234.872.012
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Bphtb	178.130.500	165.787.300	47.789.400	-	-	155594850	126646051	47130300	0	0	87,35	76,39	98,62	0,00	0,00	78.341.440	65.874.240
Penyusunan Rancangan Revisi Perda Dan Perwako Pajak	14.419.200	76.519.000	-	-	-	4192100	76064650	0	0	0	29,07	99,41	0,00	0,00	0,00	18.187.640	16.051.350
Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	232.290.200	307.290.200	114.920.750	-	-	200481725	71802400	109098750	0	0	86,31	23,37	94,93	0,00	0,00	130.900.230	76.276.575
Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non Pbb-P2 Dan Bphtb	175.116.750	225.069.600	211.783.800	-	-	16150550	159147800	192824650	0	0	9,22	70,71	91,05	0,00	0,00	122.394.030	73.624.600



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Pemuktahiran Data Piutang Pbb-P2	-	202.933.450	54.463.200	-	-	0	151518650	31980200	0	0	0,00	74,66	58,72	0,00	0,00	51.479.330	36.699.770
Optimalisasi Dan Pengembangan Sumber-Sumber Pad	-	129.280.000	-	-	-	0	127444250	0	0	0	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	25.856.000	25.488.850
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Ppkd	7.999.850	-	27.991.250	-	-	6499350	0	27955500	0	0	81,24	0,00	99,87	0,00	0,00	7.198.220	6.890.970
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman Dan Penyusunan Apbd Ta. 2019	85.000.000	-	-	-	-	67375000	0	0	0	0	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000	13.475.000
Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	98.683.350	-	-	-	-	69433300	0	0	0	0	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736.670	13.886.660
Inventarisasi Aset Tanah Dan Bangunan	44.691.700	-	-	-	-	40576350	0	0	0	0	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938.340	8.115.270



Program/ Kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio anggaran terhadap belanja					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Belanja
Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dalam Mendukung Penyusunan Lkpd	95.000.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000	-
Penyusunan Perwako Barang Milik Daerah	44.740.300	-	-	-	-	4554000	0	0	0	0	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.060	910.800
Fasilitasi Dan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	24.529.500	-	-	-	-	17846560	0	0	0	0	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.900	3.569.312



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis metode SWOT. Analisis SWOT adalah analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan).

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi(*Strength*)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 4) Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
- 5) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 6) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

- 1) Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- 2) Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi;
- 3) Masih lemahnya kemampuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- 4) Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah di BPKAD.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset/barang daerah;
- 2) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- 3) Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi pengelola keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

- 1) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
- 2) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;
- 3) Kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikasi khusus pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelola keuangan dan aset daerah yang sering berubah-ubah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun, peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. Ada beberapa kendala dan permasalahan yang dialami BPKAD Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan nya.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
2. Pemahaman terhadap pengelola keuangan daerah masih relatif rendah;
3. Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;
4. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;



5. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Sinergis dan koordinasi antar unit kerja belum optimal.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024 bahwa Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah : **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”**

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya berdasarkan pada hasil telaahan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas	Penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas	Surat Edaran Wali Kota tentang Percepatan Penyerapan Anggaran
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset daerah	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemanfaatan aset daerah dengan cara sewa dan lelang barang milik daerah
SDM yang kompetitif	Kurang tertibnya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada semua Perangkat Daerah	Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada seluruh Perangkat Daerah belum optimal	Peningkatan Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset melalui kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun
Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi	Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1). Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001. Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.761,71 Ha, sedangkan Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah terkecil yaitu 1.415,71 Ha dari wilayah Kota Singkawang.

Tujuan RTRW Kota Singkawang Tahun 2022-2042, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang



merupakan bagian wilayah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya berdasarkan pada hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan RTRW dan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

RTRW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi BPKAD	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Perencanaan keuangan terkait dengan rencana pengembangan tata ruang dan infrastruktur Kota Singkawang	Belum terintegrasinya konsep tata ruang dengan rencana anggaran keuangan	Kurangnya pemahaman mengenai konsep tata ruang	Regulasi tentang RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*



and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan BPKAD Kota Singkawang. Isu-isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
2. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan kompeten;
3. Transparansi informasi publik;
4. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2024 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sesuai dengan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang dalam RPD yaitu: ***“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah ***“Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah”***.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Opini BKP terhadap Laporan Keuangan;

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Singkawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun Ini	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Target Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD. Strategi dan Arah Kebijakan disusun berdasarkan dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam Empat tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	
Sasaran	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
Strategi	:	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	
Arah Kebijakan	:	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah	
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Arah Kebijakan BPKAD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolan Keuangan Daerah2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah3. Pengelolaan Keuangan Daerah4. Pengelolaan Barang Milik Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang. Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang untuk Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah



- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Singkawang
Tahun Anggaran 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				BB	11.519.122.982	BB	11.645.478.158	BB	7.958.792.199	BB	8.070.192.200	BB	39.163.503.039	Singkawang
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun				100%	45.000.000	100%	45.247.500	100%	89.354.930	100%	99.354.931	100%	278.957.361	Singkawang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.055.000	2 Dokumen	15.529.420	2 Dokumen	25.529.421	10 Dokumen	61.113.841	Singkawang
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	5.765.125	1 Dokumen	5.765.125	4 Dokumen	21.557.750	Singkawang
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	15.529.421	1 Dokumen	15.529.421	4 Dokumen	41.086.342	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	15.529.421	1 Dokumen	15.529.421	4 Dokumen	41.086.342	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	15.529.421	1 Dokumen	15.529.421	4 Dokumen	41.086.342	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.027.500	2 Laporan	5.942.701	2 Laporan	5.942.701	8 Laporan	21.912.902	Singkawang
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi			3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.055.000	3 Laporan	15.529.421	3 Laporan	15.529.421	12 Laporan	51.113.842	Singkawang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun			100%	9.319.122.982	100%	9.370.378.158	100%	9.416.860.087	100%	9.468.652.818	100%	37.564.986.545	Singkawang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/Bulan	8.198.569.382	60 orang/bulan	8.243.661.514	63 Orang/bulan	3.526.841.744	63 orang/bulan	3.526.841.744	60 orang/bulan	23.495.914.384	Singkawang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	1.085.553.600	12 Dokumen	1.091.524.145	12 Dokumen	788.130.704	12 Dokumen	788.130.704	48 Dokumen	3.753.339.153	Singkawang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.055.000	12 Dokumen	40.568.964	12 Dokumen	41.968.964	48 Dokumen	102.592.928	Singkawang
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	10.027.500	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.027.500	1 Laporan	15.741.234	1 Laporan	15.741.234	4 Laporan	41.509.968	Singkawang
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.027.500	2 Dokumen	10.016.882	2 Dokumen	10.016.882	8 Dokumen	30.061.264	Singkawang



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran			2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.027.500	2 Laporan	15.741.234	2 Laporan	15.741.234	8 Laporan	41.509.968	Singkawang
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.027.500	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	8 Dokumen	10.027.500	Singkawang
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Aset yang dilaksanakan			100%	35.000.000	100%	35.192.500	100%	32.355.764	100%	32.355.764	100%	114.849.028	Singkawang
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.027.500	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	20.027.500	Singkawang
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	10.027.500	Singkawang
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Braang Milik Dearah SKPD			1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.027.500	1 Laporan	16.590.750	1 Laporan	16.590.750	4 Laporan	43.209.000	Singkawang
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenalan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenalan Barang Milik Daerah SKPD			2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.027.500	2 Laporan	0	2 Laporan	0	8 Laporan	10.027.500	Singkawang
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.027.500	12 Laporan	10.765.014	12 Laporan	10.765.014	48 Laporan	31.557.528	Singkawang
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.027.500	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	10.027.500	Singkawang
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	10.027.500	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan			100%	100.000.000	100%	123.550.000	100%	109.222.244	100%	109.222.244	100%	441.994.488	Singkawang
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.027.500	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	10.027.500	Singkawang
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan			40 Paket	70.000.000	40 Paket	70.385.000	40 Paket	73.691.994	40 Paket	73.691.994	160 Paket	287.768.988	Singkawang
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	5.530.250	1 Dokumen	5.530.250	4 Dokumen	21.088.000	Singkawang
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	10.027.500	Singkawang
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	70.027.500	Singkawang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.055.000	10 Orang	0	10 Orang	0	40 Orang	20.055.000	Singkawang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			40 Orang	0	40 Orang	5.000.000	40 Orang	0	40 Orang	0	160 Orang	5.000.000	Singkawang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40 Orang	0	40 Orang	18.000.000	40 Orang	0	40 Orang	0	160 Orang	18.000.000	Singkawang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminitrasi Umum yang dilaksanakan			100%	620.000.000	100%	623.410.000	100%	565.919.919	100%	665.919.919	100%	2.475.249.838	Singkawang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.165.000	12 Paket	15.368.947	12 Paket	15.368.947	48 Paket	90.902.894	Singkawang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.110.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	48 Paket	120.110.000	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.110.000	12 Paket	25.221.000	12 Paket	25.221.000	48 Paket	90.552.000	Singkawang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.027.500	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	4 Paket	40.027.500	Singkawang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.055.000	1 Paket	45.248.400	1 Paket	45.248.400	4 Paket	110.551.800	Singkawang
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.027.500	1 Dokumen	5.081.572	1 Dokumen	5.081.572	4 Dokumen	20.190.644	Singkawang
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.055.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	60.055.000	Singkawang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	502.750.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	500.000.000	48 Laporan	1.902.750	Singkawang
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.055.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	20.055.000	Singkawang
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.055.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	20.055.000	Singkawang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan			100%	680.000.000	100%	683.740.000	100%	1.649.695.142	100%	1.649.695.142	100%	4.663.130.284	Singkawang
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			1 Unit	300.000.000	1 Unit	301.650.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	601.650.000	Singkawang
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.385.000	2 Unit	900.000.000	2 Unit	900.000.000	10 Unit	282.318.482	Singkawang
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			5 Unit	30.000.000	5 Unit	30.165.000	5 Unit	33.181.500	5 Unit	33.181.500	20 Unit	126.528.000	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			6 Unit	20.000.000	6 Unit	20.110.000	22 Unit	672.271.642	6 Unit	672.271.642	40 Unit	1.384.653.284	Singkawang
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan			1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.110.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	40.110.000	Singkawang
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.440.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	160.440.000	Singkawang
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.440.000	1 Unit	44.242.000	1 Unit	44.242.000	4 Unit	248.924.000	Singkawang
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.440.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	160.440.000	Singkawang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			100%	400.000.000	100%	422.200.000	100%	709.203.438	100%	709.203.438	100%	2.240.606.876	Singkawang
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.110.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	9.000.000	4 Laporan	58.110.000	Singkawang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	301.650.000	1 Laporan	300.203.438	1 Laporan	300.203.438	4 Laporan	1.202.056.876	Singkawang
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Laporan	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	20.000.000	Singkawang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.440.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	4 Laporan	960.440.000	Singkawang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			100%	320.000.000	100%	341.760.000	100%	406.000.000	100%	406.000.000	100%	1.473.760.000	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.110.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	4 Unit	120.110.000	Singkawang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			40 Unit	60.000.000	40 Unit	60.330.000	40 Unit	60.000.000	40 Unit	60.000.000	160 Unit	240.330.000	Singkawang
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara			1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.330.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	120.330.000	Singkawang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara			5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.330.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	20 Unit	220.330.000	Singkawang
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara			1 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	10.000.000	Singkawang
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara			1 Unit	0	1 Unit	10.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	10.000.000	Singkawang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.330.000	1 Unit	256.000.000	1 Unit	256.000.000	4 Unit	632.330.000	Singkawang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.330.000	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	120.330.000	Singkawang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	4 Unit	0	Singkawang
	Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi			100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Singkawang
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	0	Singkawang
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu				100%	12.083.012.097	100%	12.141.030.110	100%	9.092.379.156	100%	9.308.475.521	100%	42.624.896.884	Singkawang
	Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target														
	Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu														
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda/Perwako yang disusun				2 Perda 2 Perwako	1.096.110.321	2 Perda 2 Perwako	1.102.138.928	2 Perda 2 Perwako	1.458.092.011	2 Perda 2 Perwako	1.458.092.011	8 Perda 8 Perwako	5.114.433.271	Singkawang
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.660.000	1 Dokumen	70.608.742	1 Dokumen	70.608.742	4 Dokumen	381.877.484	Singkawang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.660.000	1 Dokumen	50.448.976	1 Dokumen	50.448.976	4 Dokumen	341.557.952	Singkawang
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.220.000	1 Dokumen	60.566.947	1 Dokumen	60.566.947	4 Dokumen	201.353.894	Singkawang
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.220.000	1 Dokumen	50.827.554	1 Dokumen	50.827.554	4 Dokumen	181.875.109	Singkawang
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	20.914.400	1 Dokumen	25.026.303	1 Dokumen	25.026.303	4 Dokumen	91.767.006	Singkawang
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	20.800.000	1 Dokumen	20.914.400	1 Dokumen	30.016.532	1 Dokumen	30.016.532	4 Dokumen	101.747.464	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	201.100.000	1 Dokumen	500.596.150	1 Dokumen	500.596.150	4 Dokumen	1.402.292.300	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1 Dokumen	180.600.000	1 Dokumen	181.593.300	1 Dokumen	510.206.862	1 Dokumen	510.206.862	4 Dokumen	1.382.607.024	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.275.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	100.275.000	Singkawang
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			1 Dokumen	20.500.000	1 Dokumen	20.612.750	1 Dokumen	15.554.838	1 Dokumen	15.554.838	4 Dokumen	72.222.426	Singkawang
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.770.000	1 Dokumen	144.239.107	1 Dokumen	144.239.107	4 Dokumen	569.248.214	Singkawang
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			1 Dokumen	143.410.321	1 Dokumen	144.199.078	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	287.609.399	Singkawang
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu			100%	321.600.000	100%	323.368.800	100%	442.622.240	100%	442.622.240	100%	1.530.213.280	Singkawang
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 Dokumen	40.300.000	12 Dokumen	40.521.650	12 Dokumen	10.091.087	12 Dokumen	10.091.087	48 Dokumen	101.003.824	Singkawang
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	0	Singkawang
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			4 Dokumen	20.400.000	4 Dokumen	20.512.200	4 Dokumen	25.401.991	4 Dokumen	25.401.991	16 Dokumen	91.716.182	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			12 Dokumen	170.000.000	12 Dokumen	170.935.000	12 Dokumen	300.937.529	12 Dokumen	300.937.529	48 Dokumen	942.810.058	Singkawang
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	16 Dokumen	0	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.027.500	12 Laporan	15.306.706	12 Laporan	15.306.706	48 Laporan	40.640.912	Singkawang
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			12 Dokumen	40.700.000	12 Dokumen	40.923.850	12 Dokumen	65.233.677	12 Dokumen	65.233.677	48 Dokumen	212.091.204	Singkawang
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen	45.200.000	1 Dokumen	45.448.600	1 Dokumen	25.651.250	1 Dokumen	25.651.250	4 Dokumen	141.951.100	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			100 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	0	100 Orang	0	400 Orang	0	Singkawang
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu			100%	318.900.000	100%	320.653.950	100%	477.614.140	100%	477.614.140	100%	1.594.782.230	Singkawang
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	48 Laporan	0	Singkawang
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	4.223.100	1 Dokumen	10.645.410	1 Dokumen	10.645.410	4 Dokumen	29.713.920	Singkawang
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			1 Laporan	9.700.000	1 Laporan	9.753.350	1 Laporan	0	1 Laporan	0	4 Laporan	19.453.350	Singkawang
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	200.000.000	7 Laporan	201.100.000	7 Laporan	300.152.314	7 Laporan	300.152.314	28 Laporan	1.001.404.628	Singkawang
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.330.000	1 Dokumen	115.525.666	1 Dokumen	115.525.666	4 Dokumen	351.381.332	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Singkawang
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	4 Dokumen	21.000.000	Singkawang
	Penyusunan Analisis Laporan Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.027.500	2 Dokumen	15.630.250	2 Dokumen	15.630.250	8 Dokumen	41.288.000	Singkawang
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.055.000	2 Dokumen	25.160.500	2 Dokumen	25.160.500	8 Dokumen	70.376.000	Singkawang
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			70 Orang	30.000.000	70 Orang	30.165.000	70 Orang	0	70 Orang	0	280 Orang	60.165.000	Singkawang
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja tidak terduga			100%	9.968.229.166	100%	10.014.615.872	100%	6.163.772.950	100%	6.379.869.315	100%	32.526.487.303	Singkawang
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			1 Laporan	968.229.166	1 Laporan	973.554.426	1 Laporan	400.165.820	1 Laporan	400.165.820	4 Laporan	2.742.115.232	Singkawang
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	9.041.061.446	1 Laporan	5.763.607.130	1 Laporan	5.979.703.495	4 Laporan	29.784.372.071	Singkawang
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase tercapainya dukungan sistem informasi keuangan daerah pada perangkat daerah			1 Tahun	378.172.610	1 Tahun	380.252.559	1 Tahun	550.277.815	1 Tahun	550.277.815	4 Tahun	1.858.980.799	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1 Dokumen	378.172.610	1 Dokumen	380.252.559	1 Dokumen	550.277.815	1 Dokumen	550.277.815	4 Dokumen	1.858.980.799	Singkawang
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset-aset daerah yang terdata			80%	865.703.422	80%	908.988.593	80%	1.010.174.369	80%	1.010.174.368	80%	3.774.599.425	Singkawang
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah			7 Kegiatan	865.703.422	7 Kegiatan	908.988.593	7 Kegiatan	1.010.174.369	7 Kegiatan	1.010.174.368	28 Kegiatan	3.774.599.425	Singkawang
	Penyusunan Standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.550.000	2 Dokumen	155.238.165	2 Dokumen	155.238.165	8 Dokumen	511.026.330	Singkawang
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.082.500	2 Dokumen	4.942.713	2 Dokumen	4.942.713	8 Dokumen	39.967.926	Singkawang
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.082.500	2 Dokumen	66.797.115	2 Dokumen	66.797.115	8 Dokumen	163.676.730	Singkawang
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	40.220.000	5 Dokumen	70.813.723	5 Dokumen	70.813.723	20 Dokumen	221.847.446	Singkawang
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	60.330.000	2 Laporan	113.813.723	2 Laporan	113.813.723	8 Laporan	347.957.446	Singkawang
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.110.000	1 Laporan	10.018.400	1 Laporan	10.018.400	4 Laporan	60.146.800	Singkawang
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	350.703.422	1 Laporan	352.632.291	1 Laporan	379.469.941	1 Laporan	379.469.940	4 Laporan	1.462.275.594	Singkawang
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.165.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	4 Laporan	100.165.000	Singkawang



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.110.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	8 Laporan	70.110.000	Singkawang
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	120.660.000	4 Dokumen	72.117.043	4 Dokumen	72.117.043	16 Dokumen	384.894.086	Singkawang
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.275.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	4 Laporan	160.275.000	Singkawang
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.137.500	1 Laporan	45.358.828	1 Laporan	45.358.828	4 Laporan	140.855.156	Singkawang
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			70 Orang	20.000.000	70 Orang	58.633.802	70 Orang	26.604.718	70 Orang	26.604.718	280 Orang	131.843.238	Singkawang
JUMLAH						24.467.838.501		24.695.496.861		24.816.734.158		25.008.549.518		85.583.440.675	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode empat tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sangat berkaitan erat dengan dokumen RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk empat (4) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Singkawang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	9
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan pencapaian penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase OPD yang menyampaikan LBMD tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang adalah merupakan program Kota, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang adalah merupakan penjabaran program RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA BPKAD ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPKAD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/ RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan diperlukan adanya :



1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra PD BPKAD.

Demikian Renstra ini dibuat, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kota Singkawang



Widatoto. S, S.E., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 199710 1 001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Pelita Nomor 1 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) - Fax. (0562) -

Email : bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el : bpkad@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 100.3.3/23/BPKAD.SET/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk optimalisasi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026 sesuai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, perlu menunjuk Tim Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang tentang Penunjukkan Tim Penyusun draft dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Barat;

28. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 (Tambahan Berita Daerah Nomor 13);
29. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tentang TIM Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dictum Kesatu Keputusan ini, yaitu melaksanakan tugas secara penuh dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 17 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,



Widatoto S, S.E., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 199710 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang
5. PNS yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 100.3.3/23/BPKAD.SET/2024
TANGGAL : 17 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

**TIM PENUNJUKKAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator	
4.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Koordinator Bidang Anggaran Daerah	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah	
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinator Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
7.	Kepala Bidang Aset	Koordinator Bidang Aset	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9.	ASN dan Non ASN di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 17 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah,



Widatoto S, S.E., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 199710 1 001